

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TATA PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI
KELAS I BANJARMASIN)**

***LEGAL RESPONSIBILITY FOR MANAGEMENT OF STATE PROPERTY (CASE STUDY AT
THE IMMIGRATION OFFICE CLASS I BANJARMASIN)***

**ARIEF SUTRIAMAN
18810250**

ABSTRAK

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Hukum, Pengelolaan Barang

Pengelolaan Barang Milik Negara ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dalam prakteknya, banyak kendala yang terjadi, antara lain kurangnya tenaga SDM untuk menyajikan laporan keuangan serta mengelola Barang Milik Negara, kebijakan untuk pengelolaan aset yang belum mengakomodir semua hal yang diperlukan, penguasaan dan pemeliharaan aset agar tidak hilang, rusak, atau dicuri, dan sebagainya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan antara inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pengamanan aset Negara.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui; pertanggungjawaban hukum dalam hal pengadaan pada kepemilikan aset barang milik pemerintah dan penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset Barang Milik Negara apabila ada yang diselewengkan oleh pejabat pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertanggungjawaban hukum terhadap barang milik negara yang hilang di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan terutama pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sudah berjalan dengan baik. Penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset Barang Milik Negara apabila ada yang diselewengkan oleh pejabat pemerintah yaitu Pemberian sanksi telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 pasal 4 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

ABSTRACT

Keywords: *Legal Liability, Goods Management*

Management of State Property is not as easy as imagined. In practice, many obstacles occur, including the lack of human resources to present financial reports and manage State Property, policies for asset management that have not accommodated all the necessary things, control and maintenance of assets so that they are not lost, damaged, or stolen, and so on. . In this case, it shows that the management of inventory, bookkeeping, and reporting has a very strong influence on the security of state assets.

In this study the researchers wanted to know; legal accountability in terms of procurement on ownership of government-owned assets and law enforcement on the management of state-owned assets if any are misused by government officials. The method used in this research is the empirical juridical method.

The research results show that; Legal accountability for lost state property in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in South Kalimantan, especially at the Class I Immigration Office in Banjarmasin, has been going well. Law enforcement on the management of State-Owned Assets if something is misused by government officials, namely the imposition of sanctions has been regulated by Government Regulation Number 38 of 2016 Article 4 concerning Procedures for Claiming State/Regional Compensation Against Civil Servants Not Treasurer or Other Officials.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prasetiawan Hamzah dan Arvan Carlo Djohansjah. 2010. Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara. Departemen Keuangan RI, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan, Jakarta.
- Anwar Borahima, 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Jakarta: Kencana.
- Aziz Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Pamungkas, 2013. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah, Jilid 1, Edisi Pertama, Bogor : Kesatuan Press.
- Borahima, Anwar, 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Jakarta: Kencana
- Bung Pokrol “Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?”
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi?>, diakses 23 Mei 2022
- Daud Hidayat Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 22 Mei 2022
- Dikutip pada laman website: www.bppk.depkeu.go.id (Oktavia Ester Pangaribuan dan Sumini Widayiswara Muda, Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah) Diakses pada 26 Mei 2022. Pukul 18.07 wita
- Hamzah, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan, Jakarta: Pengayoman, 2013.
- Lilik Mulyadi, 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya, Edisi Pertama, Cetakan Ke-I, PT. Alumni, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2013. Hukum Acara Perdata, Cet. 13, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, 2011. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia.
- Much. Nurachmad, 2011. Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan PP No. 54 tahun 2010 & Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia.
- Prof. DR. Budiono Kusumohamidjojo,SH. 2004. Filsafat Hukum (Problematisasi Ketertiban Yang Adil). Penerbit CV. Mandar Maju Bandung.
- Tri Ratna Taufiqurrahman, Latar Belakang Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Terkait PBJ Pemerintah, diakses dari <https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-latar-belakang-perpres-nomor-16-tahun-2018-terkait-pbj-pemerintah/> pada tanggal 31 Mei 2022 pada pukul 08.26 Wita.
- Triska Rarang, 2020. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Lex Crimen, Vol. IX, No. 2, hlm. 148-149.